

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, El. (2020). Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Journal Of Social Work and Social Service*, 1(1), 44-45.
- Ali, Zainuddin. (2015). *Sosiologi Hukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Al-Maliki, Abdurrahman. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Bangil: Jawa Timur.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amrusi, Imam dan M. Hasani Ubaidillah. (2013). *Hukum Tata Negara islam*. Sidoarjo: CV. Mitra Media Nusantara.
- Anggraini, Maibela dan Syapril Abdullah. (2018). Evaluasi Pelaksanaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. *PUBLIKA*, 4(1), 38.
- Awaliah, Firda, M. Yusuf, dan J. Cadith. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Kota Serang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), 536.
- Baharuddin, Ifan. (2018). Implementasi Program pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial di Kelurahan Gubuksuma Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Akrab Juara*, 3(1), 6.
- Chentari, Vrisco dan Karjuni Dt Ma'ani. (2020). Kualitas Pelayanan Tim Pelaksana Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Nagari Sago Salido Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara*, 2(4), 50.
- Desa Karangturi. Profil Desa Karangturi. <https://karangturi-munjungan.trenggalekkab.go.id/first/artikel/48>. Diakses tanggal 04 Februari 2023.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. (2009). *Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Agama Islam.
- Gaffar, Affan. (2009). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Jogja: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Habibullah. (2020). Peran Pusat Kesejahteraan Sosial Dalam Pelayanan Sosial Integratif. *Jurnal Sosio Konsepsia*, 9(3). 300.
- Hadi, Sutrisno. (2000). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Multi Presindo

- Hartati, Sri. Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin. <https://badilag.Mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/keadilan-hukum-bagi-orang-miskin>. Diakses 10 Maret 2023.
- Hendrikus, Marselinus Bin. (2016). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Fakir Miskin Kelompok Usaha Bersama di Kecamatan Nunukan. [Master Thesis]. Universitas Terbuka.
- Hermawati, Istiana, dan Johanis Risambessy. (2021). Asesmen Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(2), 296.
- Jacobus, Elviera Handayani, Paulus Kindangen, dan Een. N. Walewangko. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 19(7), 90.
- Kadji, Yulianto. Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. <http://repository.Ung.ac.id/hasilriset/show/318/kemiskinan-dan-konsep-teoritisnya.html>. Diakses 10 Maret 2023.
- Kamus Hukum. Apa Pengertian dan Definisi Penanganan? Kamus Hukum Indonesia. <https://cekhukum.com/penanganan-kamus-hukum/>. Diakses tanggal 07 Maret 2023.
- Karhi, Nisjar S. (1997). Beberapa Catatan tentang Good Governance. *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*, 1(2), 119.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pedoman Umum Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). <https://kemensos.go.id/pedoman-umum-sistem-layanan-dan-rujukan-terpadu-slrt>. Diakses 26 Mei 2023.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2016). Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. *IOSR Journal Of Economics and Finance*, 56.
- Law, Adco. Hukum Positif dan Keberadaannya. <https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/>. Diakses 07 Maret 2023
- M. Basri. Puskesmas SLRT: Menjembatani dan Memperkuat Kesejahteraan Sosial. <https://kemensos.go.id/puskesmas-slrt-menjembatani-dan-memperkuat-kesejahteraan-sosial>. Diakses 20 Februari 2023.
- Mamonto, Novan, I. Sumampow, dan G. Undap. (2018). Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Pembangunan Dana Desa Tahun

- 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 3.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Michelle, Vheny, Roosje Lasut, Herry Tuwaidan. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Fakir Miskin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. *Journal Lex Privantum*, 8.(32), 101.
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mudhofir, Abdullah. (2009). *Jihat Tanpa Kekerasan*. Jakarta: Inti Media.
- Mulyadi, Deddy, Hendrikus T, dan M. Nurafandi. (2015). *Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nurwanda, Asep dan Elis Badriah. (2020). Analisis Program Inovasi Desa Dalam Mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal Oleh Tim Pelaksana Inovasi Desa (PID) di Desa Bangunharja Kabupaten Ciamis. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 71.
- Pantja Astawa, I. Gede. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumnus.
- Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Pasal 12 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pasal 30 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Pasal 32 Huruf C Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

- Pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
- Pasal 35 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Pasal 8 Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Payu, Bobby Rantow. (2010). Analisis Kondisi Kemiskinan Absolut. *Jurnal Pelangi ilmu*, 3(4), 47-48.
- Perpustakaan Lemhanas Republik Indonesia. http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-12150_0000_011883/swf/1485/files/basic-html/page6.html. diakses 25 Februari 2023.
- Putra, Gandung Setya. (2020). Layanan Interaktif Pemerintah dan Masyarakat Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Trenggalek. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadani, Resky, dan Muhammad Anis. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Prespektif Syar'iyah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Syar'iyah*, 3(2), 333.
- Ridwan. (2006). Metode dan Teknik Penyusunan Tesis. Bandung: Alfabeta.
- Rojak, Jeje Abdul. (2014). Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers.
- Roring, Delpiero. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 3-4.
- Sa'idah, Zulia dan Indah Prabawati. (2019). Implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. *Foreign Affairs*, 91.(5), 1689.
- Saleh, Ahmad Muwafik. (2020). Prinsip Tangan di Atas (Yadul 'Ulya) Sebagai Spirit Komunikasi Pelayanan Publik. <https://kanal24.co.id/berita/prinsip-tangan-di-atas-yadul-ulya-sebagai-spirit-komunikasi-pelayanan-publik>. Diakses tanggal 02 Juni 2023.
- Santoso, M. Agus. (2014). Hukum. Moral dan Keadilan Sebuah Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
- senewe, Julita, Debby Ch, dan Agnes L.C.P. (2021). Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi

- Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA*, 9(3), 175.
- Silalahi, Ulber. (2015). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refrika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. (2022). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sonata, Depri Liber. (2014). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Kharakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 30.
- Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek 2020.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suriyani, Ariska. (2021). *Peran Dinas Sosial Dalam Penanganan Fakir Miskin*. [Skripsi]. Universitas Muhammdiyah Makassar.
- Syahrir, Pratiwi Syahsani dan D Syamsuddin. (2021). *Konsep Siyasa Al-Maliyah Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab dan Khalifah Utsman Bin Affan*. *Jurnal Siyasatuna*. 2(2), 429.
- Tasbih. (2010). *Kedudukan dan Fungsi Hadist Sebagai Sumber Hukum Islam*. *Jurnal Al-Fikr*, 332.
- Tommy. (2018). *Analisis Yuridis Penjaminan Hak Atas Tanah Yang Sudah Berakhir Sedangkan Perjanjian Kredit Belum Berakhir di Bank Penkreditan Rakyat Dana Nusantara di Kota Batam*. [Undergraduate thesis]. Universitas Internasional Batam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Yulath, Abd. Basith Isnaini. (2022). *Tinjauan Fikih Siyasa Maliyah Terhadap Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan PERMENSOS No. 1 Tahun 2018: Studi Kasus di Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan*. [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Jogjakarta.